

PILPRES 2019 DAN MEMBANGUN BUDAYA POLITIK YANG SANTUN



Drs. Rudi Martiawan, M.Si
(Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas)

Pendahuluan

Konstelasi politik nasional terasa hiruk pikuk dengan kontestasi (rebutan) kekuasaan, antarpolitical party politik daripada menjadikannya sebagai sarana peningkatan kualitas berdemokrasi. Bahwa politik adalah kontestasi perebutan kekuasaan tidaklah salah, tetapi kontestasi politik *an sich* tanpa disertai dengan perilaku berpolitik yang santun dan beradab hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan politik. Dinamika politik tidak lagi berorientasi pada upaya menciptakan demokrasi berkeadaban yang baik. Realitas yang demikian berpotensi untuk mengacaukan kehidupan berkebangsaan Indonesia.

Kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara kita -meminjam terminologi Yasraf Amir Piliang- sebagai gerak *turbulensi* sosial, yaitu semacam pergerakan sosial yang tidak beraturan dan acak. Wacana politik yang berkembang tanpa arah; wacana ekonomi yang dihantui fluktuasi kronis; wacana sosial yang dilanda kekerasan tanpa akhir; dan wacana budaya yang diselimuti ketidakpastian nilai, sesung-

guhnya berawal dan diawali dari ketidakmampuan elit politik membentuk mekanisme bermain dalam (pentas) politik secara baik melalui *koridor* politik yang mengedepankan nilai (obyektifitas) kebenaran serta ketidakmampuan sistem tersebut mengkonstruksi masyarakat politik yang berperadaban. Artinya, bagaimana keseluruhan permainan dan pencapaian cita-cita politik (termasuk kekua-

saan) yang seharusnya ditempuh oleh masyarakat politik (yang mengaku) sudah 'beradab' melalui mekanisme yang rasional, bukan sekadar merasionalisasi sebuah 'tindakan' yang tidak rasional. Bagaimana dengan Pilpres 2019 yang notabene akan memilih presiden dan wakilnya sebagai elit politik yang akan memimpin negara dan bangsa ini.

Pilpres 2019: Membangun Kultur Politik

Fakta politik yang (hanya) berisi kontestasi-kontestasi kekuasaan disertai dengan langgam politik yang buruk dan mencederai keluhuran politik, memang menjadikan politik bercitra negatif. Seolah berpolitik selalu berkonotasi dengan 'pertarungan' kekuasaan yang tidak pernah selesai, penuh dengan kebencian satu sama lain. Peristiwa politik itu -meminjam terminologi Romo Armada (2011)- menjadikan dinamisme politik kita yang mengalami proses pendangkalan makna. Situasi ini jelas mereduksi makna politik sesungguhnya. Politik itu memiliki cakupan kedalaman pengalaman hidup manusia, sebab di dalamnya dikelola kebudayaan, pendidikan dan kecerdasan, *well being* (kesejahteraan), relasi personal-komunitas, tata religius, tata kelola kehidupan, tata kelola sumberdaya alam dan manusia, hukum dan sistem peradilan, aneka tradisi kebersamaan, kegotongroyongan, solidaritas, dan lainnya (Armada Riyanto, 2011: 14).

Politik adalah sebuah kemampuan mengelola kehidupan bersama

dengan baik dan beradab, menuju kualitas hidup yang lebih baik. Berpolitik itu sesungguhnya berorientasi pada kemampuan mengabdikan pada kepentingan publik/orang lain. Kerja politik adalah kerja pengabdian. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah memilih politik sebagai jalan hidupnya, sesungguhnya ia sudah mengikhlaskan dirinya untuk hidup demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Politik, termasuk partai politik adalah rumah pengabdian bagi setiap orang yang rela mengistirahatkan nafsu pribadi, seperti penguasaan harta-benda, agar dapat mengabdikan secara total demi orang lain. Kontestasi politik dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan presiden (Pilpres 2019) maupun pemilihan legislatif (pileg) haruslah dimaknai sebagai tempat masyarakat belajar berdemokrasi. Kalah dan menang dalam kontestasi adalah kewajaran ketika kita menerima demokrasi sebagai sistem berpolitik. Yang menang tidak harus bersorak gembira, dan yang kalah tidak harus sakit hati. Semuanya harus dipahami sebagai suatu proses berdemokrasi yang berkeadaban.

Setiap proses politik adalah pendidikan politik bagi warga belajar berdemokrasi. Demokrasi bukanlah suatu produk jadi yang tiba-tiba tercipta dengan sendirinya. Demokrasi merupakan suatu kondisi yang terus-menerus diciptakan. Sebagai proses belajar berdemokrasi, maka ia membutuhkan komitmen yang tulus dari setiap elite politik untuk memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan. Elit politik terutama di partai politik, baik yang

duduk sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, harus dapat menjadi teladan berpolitik yang baik. Elit politik menjadi figur politik yang selayaknya pantas diteladani masyarakat dalam menciptakan kualitas berdemokrasi yang lebih baik

Itulah sebabnya, Pilpres 2019 perlu memperhatikan agar keluhuran tidak ternodai oleh perilaku politik yang buruk, diperlukan upaya serius membangun budaya politik yang santun dan berkeadaban. Menurut Ignas Kleden (1999) budaya politik adalah seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi dasar tingkah laku para elite politik, agar dalam setiap proses politik berorientasi pada nilai (*value*) yang pantas diteladani. Seperangkat nilai dan norma dalam berpolitik haruslah menjadi wujud nyata dalam tingkah laku politik. Hubungan antara budaya politik dan tingkah laku politik bukanlah berarti bahwa yang pertama memengaruhi yang kedua, tetapi juga tingkah laku politik akan berpengaruh pada wujud dan sifat budaya politik. Ini artinya, bahwa tingkah laku politik yang bersih akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan sebaliknya tingkah laku politik yang negatif akan menghasilkan budaya politik yang dengan mudah melakukan penyelewengan kekuasaan.

Bersepakat dengan Haryatmoko (2003) budaya politik dalam konteks ini, (1) mau menekankan normatif, kaidah politik dan terutama pembinaan nilai-nilai dan perwujudan cita-cita seperti kesejahteraan umum, keadilan, dan keharuman bangsa, dan (2) budaya

politik dimaksudkan sebagai yang mengarahkan dan membentuk tata hidup, perilaku, dan juga etos bangsa. Ketika (ber)politik berlandaskan dan berorientasi pada budaya politik yang demikian, maka politik merupakan aktivitas kodrat sosial manusia yang beradab. Politik itu ruang pengabdian luhur seseorang demi kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Hannah Arendt, politik merupakan seni mengabdikan diri manusia, sekaligus seni mengabdikan diri manusia kepada manusia lainnya.

Aktivitas politik yang didasarkan oleh sistem nilai dan norma membangun *civic virtue* yang berkeadaban akan membentuk kebiasaan berpolitik yang, (1) tingkah laku politiknya didasarkan pada apa yang dinamakan sebagai kepantasan politik (*political propriety*), dan (2) tingkah laku politik didasarkan pada moralitas politik (*political correctness*). (Ignas Kleden, 1999: 238). Jadi, budaya politik yang santun dan baik adalah bila konstelasi politik melahirkan suatu tingkah politik yang mampu menjamin berfungsinya keluhuran politik dalam menciptakan kehidupan yang berorientasi pada kesejahteraan, kesetaraan, keadilan sosial, solidaritas antarsesama, serta prinsip kebebasan setiap manusia. Intinya, budaya politik itu menjamin kualitas tata kelola kehidupan bersama menjadi lebih baik. Budaya politik yang baik melahirkan kualitas pengelolaan kehidupan publik yang memiliki keutamaan, dan akhirnya akan mendorong terciptanya kualitas penguatan demokrasi dalam masyarakat kita.

Catatan Penutup

Orientasi kekuasaan telah menenggelamkan semua keberadaban dan kecerdasan. Pilpres 2019 sebagai bentuk pertarungan kekuasaan tidak lagi bernuansakan pada 'kecantikan' dalam berpolitik, tetapi sudah dihindangi pada bentuk-bentuk kebencian dan prasangka sosial akut, yang lebih mengedepankan *rasionalitas tujuan* ketimbang *rasionalitas nilai*. Endapan '*virus kebencian*' -dengan demikian- telah meluluh-lantakan fakta objektivitas kebenaran, tetapi disesaki oleh keinginan (kebencian) untuk semakin menambah dan memperlebar 'lubang' kesalahan lawan politiknya.

Selama bangunan masyarakat politik kita masih mengedepankan politik kekuasaan berbasis 'kebencian', maka selama itu pula jaminan berakhirnya krisis sosial-politik dan ekonomi tidak lebih sekadar 'mimpi'. Reformasi yang semula memberikan harapan bagi terciptanya *clean government* (pemerintahan yang bersih) justru hanya melahirkan suatu pemerintahan yang 'sarat' dengan skandal politik. Reformasi yang semula memberikan harapan bagi terpenuhinya rekrutmen elit politik (DPR/MPR) yang mengedepankan kepentingan rakyat, justru hanya melahirkan politisi yang sibuk dengan urusan (kepentingan kelompok) masing-masing, yaitu politisi yang sibuk membela kepentingan kelompok (partai) meskipun yang dibela belum tentu benar.

Demikianlah kalau berpolitik dalam Pilpres 2019 tanpa dibarengi pembentukan karakter berpolitik yang cerdas dan bermoral. Selain kian membuat ketidakjelasan konstruksi masyarakat politik kita, ia hanya akan menghasilkan elit pemimpin negara dan bangsa ini serta sejumlah politisi yang hanya pandai 'berdebat' tetapi miskin sikap kearifan sebagai seorang negarawan. Itulah arah reformasi di negeri ini. Sebuah proses (reformasi) politik yang tidak dilandasi ketulusan membangun peradaban negeri ini menjadi lebih baik, melainkan disesaki dengan sejumlah nafsu untuk 'berkuasa' dan 'memperkaya' diri. Karena itulah melalui pilpres ini, saatnya kita bangun budaya politik yang santun dan baik, demi martabat kita sebagai manusia yang *homo homini socius* bukan *homo homini lupus*. *Wallahu a'lam bis ashowab*.

Sumber Bacaan:

- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, Ignas. 1999. "Budaya Politik atau Moralitas Politik" dalam TIM MAULA, 1999, *Jika Rakyat Berkuasa, Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Riyanto, E. Armada. 2011. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.